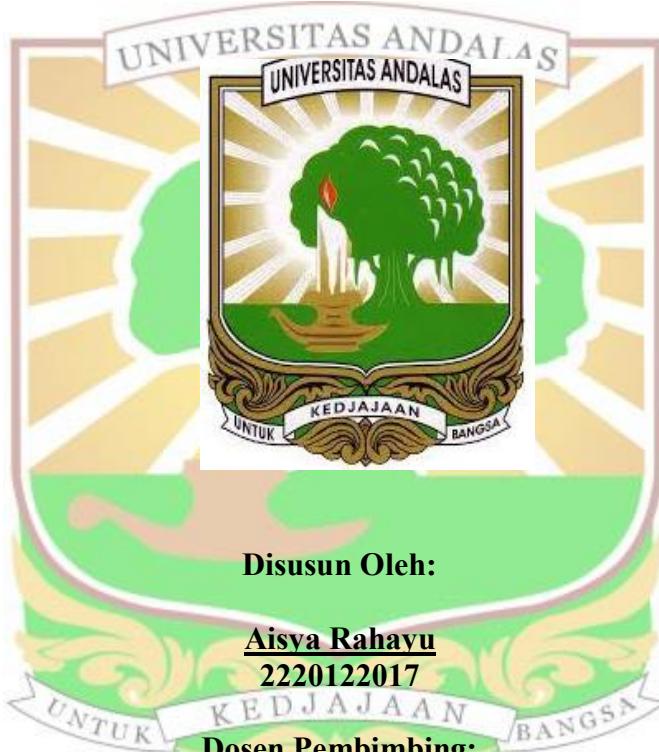


**LEGALITAS PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH
PENYIDIK AKIBAT TIDAK DITERBITKANNYA SURAT BALASAN
DARI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2025**

Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris

(Aisyah Rahayu, 2220122017, Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Pemanggilan dan pemeriksaan Notaris dalam proses penyidikan sering kali menghadapi kendala administratif, terutama ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan surat balasan atas permohonan persetujuan penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan penyidik dan upaya yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut, berdasarkan Pasal 66 UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalahnya: 1. Bagaimana legalitas pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik dalam hal tidak diterbitkannya surat balasan dari majelis kehormatan Notaris 2. Bagaimana upaya pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik akibat tidak diterbitkannya surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif penelitian pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder untuk mengkaji aspek-aspek internal hukum positif. Pertama hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakterbitan surat balasan dari MKN menyebabkan hambatan serius dalam proses penyidikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menghambat penyidik dalam melaksanakan kewenangannya dan berdampak pada proses penegakan hukum yang efektif. Hasil penelitian kedua upaya yang dilakukan penyidik Jika Majelis Kehormatan Notaris tetap menolak memberikan persetujuan untuk pemanggilan atau pemeriksaan Notaris maka penyidik penuntut umum, atau hakim dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Notaris, Penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris

Legality Of Summons And Examination Of Notaries By Investigators Due To Non-Issuance Of A Reply Letter From The Notary Honorary Council

(Aisyah Rahayu, 2220122017, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University)

ABSTRACT

The summons and examination of Notaries in the investigation process often face administrative obstacles, especially when the Notary Honorary Council does not provide a reply letter to the investigator's request for approval. This study aims to analyze the legality of investigators' actions and the efforts that can be made in this situation, based on Article 66 of the Notary Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2021 concerning the Duties and Functions, Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal, Organizational Structure, Work Procedures, and Budget of the Notary Honorary Council. Based on this, the formulation of the problem is: 1. How is the legality of the summons and examination of Notaries by investigators in the event that a reply letter is not issued from the Notary Honorary Council? 2. How are the efforts to summon and examine Notaries by investigators due to the non-issuance of a reply letter from the Notary Honorary Council?. The research method used is a normative legal research approach carried out by examining library or secondary materials to examine the internal aspects of positive law. First, the results of this study indicate that the failure to issue a reply letter from the MKN causes serious obstacles in the investigation process and creates legal uncertainty. This condition hinders investigators in exercising their authority and has an impact on the effective law enforcement process. The results of the second study of efforts made by investigators If the Notary Honorary Council still refuses to give approval for the summons or examination of a Notary, then the public prosecutor investigator, or judge can submit a request for permission to the Head of the District Court.

Keywords: Notary, Investigator and Notary Honorary Council

